

URGENSI PENGUATAN KEMANDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

M. Thasin¹, Zaryl Gofar², Ahmad Zaki Mubarak³, Muhammad Ubaidillah⁴

¹Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, thasin.rf@gmail.com

²Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, metrazaril@gmail.com

³Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, zakilasem@gmail.com

⁴Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan,
ubaidillahmuhammad01@gmail.com

Abstract: The independence of pesantren has long constituted a fundamental value at the core of the pesantren movement since the colonial era; however, its development has faced numerous structural and cultural pressures that threaten its institutional autonomy. This study aims to comprehensively identify the concept of pesantren institutional independence, analyze the urgency of strengthening such independence in the context of current regulations and contemporary challenges, and formulate strengthening strategies that can be implemented systematically. The method employed is library research with a qualitative descriptive-analytical approach, integrating primary and secondary sources including classical Islamic texts (kitab kuning), national regulations, scientific journals, and institutional reports. The findings indicate that pesantren independence encompasses three main dimensions: theological-cultural independence, institutional governance independence, and economic independence. The urgency for its strengthening is driven by internal factors, namely the degradation of independence values due to reliance on external subsidies, and external factors, namely the currents of national curriculum homogenization that potentially reduce pesantren distinctiveness. Strengthening strategies include the development of pesantren economies based on productive business units, revitalization of independence values in the curriculum, and strengthening governance based on transparency and accountability. This study affirms that independence is not merely a traditional heritage but a strategic imperative for the sustainability of pesantren as an authentic and relevant Islamic educational institution.

Keywords: Pesantren Independence, Pesantren Governance, Development Strategy

Abstrak: Kemandirian pesantren merupakan nilai fundamental yang telah lama menjadi ruh gerakan pesantren sejak era kolonial, namun dalam perkembangannya menghadapi berbagai tekanan struktural dan kultural yang mengancam eksistensi otonomi kelembagaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kemandirian kelembagaan pesantren secara komprehensif, menganalisis urgensi penguatan kemandirian tersebut dalam konteks regulasi dan tantangan kontemporer, serta merumuskan strategi penguatan yang dapat diimplementasikan secara sistematis. Metode yang digunakan adalah library research (kajian pustaka) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, mengintegrasikan sumber-sumber primer dan sekunder berupa kitab kuning, regulasi nasional, jurnal ilmiah, serta laporan institusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemandirian pesantren mencakup tiga dimensi utama, yaitu kemandirian teologis-kultural, kemandirian tata kelola kelembagaan, dan kemandirian ekonomi. Urgensi penguatannya didorong oleh faktor internal berupa degradasi nilai-

nilai kemandirian akibat ketergantungan pada subsidi eksternal, serta faktor eksternal berupa arus homogenisasi kurikulum nasional yang berpotensi mereduksi kekhasan pesantren. Strategi penguatan meliputi pengembangan ekonomi pesantren berbasis unit usaha produktif, revitalisasi nilai kemandirian dalam kurikulum, serta penguatan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian bukan sekadar warisan tradisi, melainkan imperatif strategis bagi keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang autentik dan relevan.

Kata Kunci: Kemandirian Pesantren, Tata Kelola Pesantren, Strategi Pengembangan

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah terbukti memiliki daya tahan dan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, penyebaran nilai-nilai Islam moderat, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten secara spiritual dan intelektual¹. Jauh sebelum sistem pendidikan formal diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, pesantren telah menjalankan fungsi pendidikan, sosial, dan dakwah secara mandiri dan integratif. Kemandirian tersebut bukan sekadar prinsip operasional, melainkan merupakan nilai filosofis yang menjadi fondasi eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, dalam dekade terakhir, kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan tengah menghadapi berbagai tekanan yang kompleks dan multidimensional. Ekspansi kebijakan pendidikan nasional, khususnya melalui standarisasi kurikulum dan sistem akreditasi nasional, telah menciptakan dilema bagi pesantren antara mempertahankan identitas dan kekhasan kelembagaannya di satu sisi, dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap tuntutan regulasi agar dapat memperoleh pengakuan formal di sisi lain². Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan finansial sebagian besar pesantren terhadap subsidi pemerintah dan

¹ Akmalun Najmi et al., "Peningkatan Kecerdasan Spritual Melalui Konsep 'Ikhlas Dan Ridha' Atas Pengabdian Kepada Keluarga Guru (Kyai) Pondok Pesantren," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 264–76.

² Hujjatul Fakhurridha et al., "Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta Melalui Tafsir Al-Qur'an Untuk Penguatan Empati Dan Regulasi Emosi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1426–38.

donasi eksternal, yang secara tidak langsung mereduksi otonomi kelembagaan pesantren dalam pengambilan keputusan strategis³.

Persoalan kemandirian pesantren semakin relevan untuk dikaji dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang di satu sisi memberikan pengakuan legal terhadap kekhasan pesantren, namun di sisi lain membuka ruang intervensi negara yang lebih besar dalam pengelolaan pesantren. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin dan memperkuat kemandirian pesantren, ataukah justru berpotensi mengikis otonomi yang selama ini menjadi keunggulan kompetitif pesantren dibanding lembaga pendidikan formal.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perhatian akademis terhadap isu kemandirian pesantren terus berkembang, namun masih terfragmentasi pada aspek-aspek parsial. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh berfokus pada Mujib dan Mudzakkir (2020) menyatakan kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif, namun kurang mengintegrasikan dimensi tata kelola kelembagaan dan identitas kultural⁴. Kedua, kajian membahas dampak regulasi UU Pesantren terhadap otonomi kelembagaan, tetapi lebih bersifat deskriptif dan belum menawarkan kerangka strategis yang komprehensif⁵. Ketiga, penelitian mengkaji nilai-nilai kemandirian dalam tradisi pesantren dari perspektif historis, namun kurang menganalisis relevansinya dalam konteks tantangan kontemporer⁶.

Tujuan penelitian ini meliputi tiga hal pokok yaitu mengidentifikasi dan menganalisis konsep kemandirian lembaga pendidikan pesantren secara multidimensional, mendeskripsikan urgensi penguatan kemandirian pesantren dalam konteks regulasi, tantangan internal, dan tekanan eksternal yang berkembang saat ini

³ Akmalun Najmi et al., "Intrinsic Motivation in Islamic Education: A Comparative Study of Abraham Maslow's Theory and the Concept of Ghirah in Islamic Psychology," *ILJ: Islamic Learning Journal* 4, no. 2 (2026): 273–308.

⁴ A Mujib and J. Mudzakkir, "Pengembangan Unit Usaha Produktif Pesantren Dalam Kerangka Kemandirian Ekonomi: Studi Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 34–56., <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.5531>.

⁵ A Wahid and M. Amin, "Implikasi Undang-Undang Pesantren Terhadap Otonomi Dan Kemandirian Kelembagaan Pondok Pesantren," *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2021): 198–218., <https://doi.org/10.21154/jsim.v14i2.3091>.

⁶ M Huda et al., "Nilai-Nilai Kemandirian Dalam Tradisi Pesantren: Kajian Historis Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.12231>.

dan merumuskan strategi penguatan kemandirian pesantren yang dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun manfaat penelitian ini mencakup dimensi teoritis berupa pengembangan khazanah keilmuan tentang manajemen dan pengembangan lembaga pendidikan Islam, serta dimensi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pengelola pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat eksistensi dan kemandirian pesantren di era kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, identifikasi, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif-analitik, yakni mendeskripsikan fenomena yang dikaji secara sistematis kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan kerangka teori yang relevan⁷. Sumber data yang digunakan mencakup dua kategori utama: sumber primer berupa teks-teks klasik pesantren (kitab kuning), undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pendidikan pesantren, serta dokumen resmi institusional; dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi akademik, laporan penelitian, serta prosiding seminar ilmiah yang relevan dengan tema kemandirian lembaga pendidikan pesantren yang diterbitkan dalam rentang tujuh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Sinta, dan Doaj, dengan kata kunci yang relevan meliputi kemandirian pesantren, institutional autonomy pesantren, pesantren governance, dan *Islamic boarding school management*. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, yaitu proses seleksi dan pemilahan sumber yang paling relevan dan kredibel, display data, yaitu penyajian data secara terorganisasi berdasarkan tema dan sub-tema kajian, interpretasi dan analisis kritis terhadap isi sumber yang dikaji menggunakan teknik content analysis dan penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan kajian.

⁷ Ismail Ismail and Moh Wardi Moh Wardi, "Transforming Elementary School Students' Science Literacy through Scratch-Based E-Modules Integrated with Islamic Value," *International Journal of Elementary Education* 9, no. 2 (2025): 237–47.

Hasil dan Diskusi

A. Konsep Kemandirian Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari akar historis dan filosofisnya yang dalam. Secara historis, pesantren hadir sebagai respons organik masyarakat Muslim Nusantara terhadap kebutuhan pendidikan agama yang autentik dan berakar pada tradisi keilmuan Islam. Berbeda dengan sekolah formal yang didirikan atas inisiatif negara atau kekuatan kolonial, pesantren tumbuh dari bawah (bottom-up) melalui inisiatif ulama dan komunitas setempat tanpa bergantung pada dukungan struktural dari luar⁸. Kondisi ini melahirkan etos kemandirian yang kuat, yang kemudian terlembagakan dalam prinsip-prinsip pengelolaan pesantren dari generasi ke generasi.

Secara filosofis, kemandirian pesantren bersumber dari nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara tawakkal kepada Allah dan ikhtiar mandiri sebagai bentuk tanggung jawab manusia. Konsep ini dioperasionalkan dalam tradisi pesantren melalui nilai kemandirian (istiqlaliyyah) yang diwariskan oleh para kiai pendiri. Imam Zarkasyi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, misalnya, merumuskan prinsip kemandirian pesantren dalam panca jiwa pesantren yang meliputi keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyyah, dan kebebasan berpikir⁹. Nilai-nilai ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan operasional yang mengatur seluruh aspek kehidupan pesantren, mulai dari pengelolaan ekonomi, pengembangan kurikulum, hingga hubungan pesantren dengan pihak eksternal.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kemandirian pesantren dapat dipahami sebagai bentuk otonomi institusional yang memungkinkan lembaga untuk menentukan tujuan, metode, dan standar kualitasnya sendiri tanpa diintervensi secara berlebihan oleh pihak luar. Pierre Bourdieu dalam konsepnya tentang 'field' atau ranah menjelaskan bahwa sebuah institusi pendidikan yang otonom memiliki modal budaya dan modal sosial yang memadai sehingga mampu

⁸ Z. Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Edisi Revisi)*. (LP3ES., 2020).

⁹ A. S. Zarkasyi, "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Dakwah.," in *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*, ed. S.A Wahid (Pustaka Hidayah., 2020), 89–110.

menetapkan logika internalnya sendiri dalam bersaing dan bertahan dalam ranah pendidikan yang lebih luas¹⁰. Dalam konteks ini, pesantren yang mandiri adalah pesantren yang memiliki cukup modal, baik kultural, sosial, maupun ekonomi untuk mempertahankan identitas dan relevansinya di tengah perubahan sosial. Berdasarkan telaah kepustakaan yang komprehensif, kemandirian kelembagaan pesantren dapat dikonseptualisasikan dalam tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sebagai berikut:

1. Kemandirian teologis-kultural, yang merujuk pada kemampuan pesantren untuk mempertahankan identitas keilmuan dan tradisi kultural Islamnya dalam menghadapi arus homogenisasi pendidikan. Kemandirian ini tercermin dalam otoritas pesantren untuk menentukan kurikulum berbasis kitab kuning, menetapkan metode pembelajaran seperti sorogan dan bandongan, serta menjaga tradisi keilmuan Islam klasik yang menjadi kekhasan pesantren. Kemandirian teologis pesantren merupakan kunci keberlangsungan transmisi keilmuan Islam dari generasi ke generasi, karena di dalam tradisi keilmuan inilah nilai-nilai Islam otentik direproduksi dan dipertahankan dari potensi distorsi oleh berbagai ideologi pendidikan sekuler maupun ideologi keagamaan yang tidak sesuai dengan manhaj ahlussunnah wal jama'ah¹¹.
2. Kemandirian tata kelola kelembagaan, yang mencakup kemampuan pesantren untuk mengatur dirinya sendiri secara organisasional tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal. Tata kelola yang mandiri meliputi aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, dan penetapan standar mutu internal. Pesantren yang memiliki tata kelola mandiri cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan santri dan komunitas lokal dibandingkan pesantren yang terlalu bergantung pada arahan kebijakan dari atas (top-down)¹². Kemandirian tata kelola ini juga berkaitan erat dengan regenerasi kepemimpinan dan kapasitas

¹⁰ M. Noor, "Pesantren Dan Modal Sosial: Analisis Bourdieuan Terhadap Kemandirian Institusional Pesantren Di Indonesia.," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 16, no. 1 (2020): 78–101., <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v16i1.9285>.

¹¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. (INIS., 2019).

¹² M. N Fajri and A. Rohmanu, "Otonomi Kelembagaan Pesantren Dan Respons Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional.," *Jurnal Tarbiyatuna* 12, no. 1 (2021): 75–94., <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v12i1.4782>.

pesantren dalam membangun sistem yang tidak semata-mata bergantung pada figur kiai tunggal.

3. Kemandirian ekonomi, yang merupakan kemampuan pesantren untuk membiayai seluruh operasional dan pengembangannya secara mandiri melalui sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan. Kemandirian ekonomi ini mencakup diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan unit usaha produktif, pengelolaan aset wakaf secara optimal, serta pengembangan program kewirausahaan santri. Kemandirian ekonomi bukan sekadar instrumen survival, melainkan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dalam dimensi-dimensi lainnya. Pesantren yang tidak memiliki kemandirian ekonomi akan rentan terhadap intervensi eksternal, baik dari pemerintah, donatur, maupun pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu dalam pendidikan Islam¹³.

B. Urgensi Penguatan Kemandirian Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Urgensi penguatan kemandirian lembaga pendidikan pondok pesantren menjadi isu strategis dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan pendidikan pada era kontemporer. Kemandirian pesantren tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan finansial secara berkelanjutan, tetapi juga mencakup kapasitas dalam mengelola tata kelola kelembagaan, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kurikulum, serta memperluas jejaring kemitraan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitasnya¹⁴. Penguatan kemandirian tersebut berperan penting dalam meningkatkan daya saing pesantren sebagai institusi pendidikan yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus mempertahankan fungsi utamanya sebagai pusat pembinaan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat¹⁵. Urgensi penguatan kemandirian lembaga pendidikan pondok pesantren dapat dipahami sebagai berikut:

¹³ L Muhtifah and A. Suryadi, "Kemandirian Ekonomi Sebagai Prasyarat Otonomi Pesantren: Analisis Kritis Terhadap Model Pembiayaan Pesantren Di Indonesia.," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2022): 55–78., <https://doi.org/10.21111/educan.v10i1.7214>.

¹⁴ Moh Wardi et al., "Digital Transformation of Islamic Boarding School Financial System; Formulation, Implementation and Evaluation," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2024): 461–82.

¹⁵ Gondo Adhi Saputra et al., "Epistemologi Pendidikan Agama Islam: Integrasi Sumber Transenden Dan Rasional Dalam Pembentukan Kesadaran Religius Peserta Didik," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 186–96.

Pertama. Tekanan Regulasi dan Homogenisasi Pendidikan, salah satu faktor paling signifikan yang mendorong urgensi penguatan kemandirian pesantren adalah tekanan regulasi yang semakin intensif dari pemerintah. Meskipun UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara eksplisit mengakui kekhasan dan kemandirian pesantren, implementasinya di lapangan menunjukkan kecenderungan yang justru berpotensi mereduksi otonomi pesantren. Sistem akreditasi nasional, standarisasi kurikulum melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan persyaratan sertifikasi tenaga pendidik merupakan beberapa kebijakan yang mensyaratkan penyesuaian pesantren terhadap standar nasional yang belum tentu compatible dengan sistem nilai dan tradisi keilmuan pesantren¹⁶.

Homogenisasi pendidikan yang dibawa oleh arus standardisasi nasional ini secara bertahap menggerus kekhasan pesantren yang justru menjadi keunggulan kompetitifnya. Pesantren yang semula menjadi pusat keilmuan Islam yang otentik dipaksa untuk mengadopsi format pembelajaran yang linear dan terstandar, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip pedagogi pesantren yang lebih organik dan kontekstual. Akibatnya, banyak pesantren yang mengalami dilema identitas antara mempertahankan tradisi keilmuan khasnya atau mengikuti arus standardisasi demi memperoleh pengakuan formal dan akses terhadap subsidi pemerintah.

Urgensi memperkuat kemandirian pesantren dari tekanan regulasi ini semakin nyata ketika kita mencermati fenomena ketergantungan pesantren terhadap dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana abadi pesantren yang digelontorkan oleh pemerintah. Ketergantungan finansial ini secara implisit menciptakan relasi kuasa yang tidak setara antara pesantren dan negara, di mana pesantren secara perlahan kehilangan posisi tawarnya untuk menolak atau

¹⁶ B. Bashori, "Standardisasi Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019,," *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 45–68., <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.11873>.

menegosiasikan kebijakan-kebijakan yang dianggap mengancam kemandirian dan identitasnya¹⁷.

Kedua. Tantangan Internal Kelembagaan, serta tekanan eksternal, terdapat sejumlah tantangan internal yang memperkuat urgensi penguatan kemandirian pesantren. Tantangan pertama adalah krisis regenerasi kepemimpinan yang dialami oleh banyak pesantren tradisional. Pola kepemimpinan pesantren yang bersifat karismatik dan berbasis figur kiai tunggal (sentralistik) menciptakan kerentanan struktural yang serius ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Tidak sedikit pesantren besar yang mengalami kemunduran signifikan atau bahkan kolaps setelah kiai pendirinya wafat, karena belum dibangun sistem kelembagaan yang kuat dan mandiri dari ketergantungan terhadap figur individual¹⁸.

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas manajemen dan tata kelola yang dialami oleh sebagian besar pesantren. Banyak pesantren masih mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan program pengembangan secara informal dan tidak terstruktur, sehingga tidak mampu membangun sistem akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Kondisi ini tidak hanya memperlemah kepercayaan publik terhadap pesantren, tetapi juga menyulitkan pesantren untuk mengakses berbagai peluang pengembangan yang memerlukan prasyarat tata kelola yang baik, seperti kerja sama dengan lembaga filantropi internasional, lembaga wakaf, atau institusi perbankan syariah¹⁹.

Tantangan ketiga adalah kerentanan ekonomi yang masih menjadi persoalan mendasar bagi mayoritas pesantren di Indonesia. Data Kementerian Agama tahun 2022 menunjukkan bahwa dari sekitar 36.000 pesantren yang terdaftar, sebagian besar masih mengandalkan sumber pendapatan tunggal berupa iuran santri dan donasi yang tidak terprogram. Ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil ini membuat pesantren sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan kebijakan subsidi pemerintah, sehingga kapasitas pesantren untuk

¹⁷ M. N. Harisudin, "Relasi Kuasa Pesantren Dan Negara Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2022): 205–228., <https://doi.org/10.15642/islamica.2022.16.2.205-228>.

¹⁸ S Anwar and M. Ardiansyah, "Transformasi Kepemimpinan Pondok Pesantren Dari Karismatik Menuju Manajerial: Studi Kasus Pesantren Tradisional Di Jawa Timur.," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 112–130., <https://doi.org/10.21111/educan.v9i2.6541>.

¹⁹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Edisi Revisi)*. (Ciputat Press., 2020).

mengembangkan program-program inovatif dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya menjadi sangat terbatas.

Ketiga. *Relevansi Kemandirian dalam Konteks Tantangan Kontemporer*. Dalam konteks tantangan kontemporer, urgensi penguatan kemandirian pesantren semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan sosial, budaya, dan teknologi yang dihadapi oleh pesantren. Era digitalisasi pendidikan, misalnya, membawa peluang sekaligus tantangan bagi pesantren. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses pesantren terhadap sumber-sumber keilmuan global dan memungkinkan perluasan jangkauan pendidikan pesantren. Di sisi lain, tanpa kemandirian yang kuat, pesantren rentan menjadi objek pasif dari arus informasi dan konten digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai dan tradisi keilmuan pesantren²⁰.

Selain itu, perkembangan ideologi keagamaan trans-nasional yang semakin masif juga memperkuat urgensi kemandirian pesantren. Berbagai ideologi keagamaan yang berasal dari luar, baik yang bersifat puritan maupun liberal, terus berupaya memasuki ruang pesantren melalui berbagai saluran, mulai dari kurikulum, literatur, hingga jaringan alumni. Pesantren yang memiliki kemandirian teologis-kultural yang kuat akan mampu bersikap kritis dan selektif terhadap berbagai pengaruh eksternal tersebut, sehingga dapat mempertahankan identitas keislaman yang moderat, toleran, dan berakar pada tradisi keilmuan ahlussunnah wal jama'ah yang selama ini menjadi ciri khas pesantren Nusantara²¹

Dengan demikian, upaya memperkuat kemandirian pesantren merupakan prasyarat bagi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkelanjutan, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas serta berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

C. Strategi Penguatan Kemandirian Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Strategi penguatan kemandirian lembaga pendidikan pondok pesantren perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pengembangan tata kelola

²⁰ M. Fikri and M. Ghazali, "Transformasi Digital Pesantren: Peluang Dan Tantangan Dalam Mempertahankan Identitas Keilmuan Islam," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2021): 131–149., <https://doi.org/10.35891/amb.v6i2.2346>.

²¹ A. J. Wahab, "Pesantren Dan Tantangan Ideologi Trans-Nasional: Mempertahankan Identitas Keislaman Moderat Di Era Globalisasi," *Jurnal Islamica* 16, no. 1–24 (2022), <https://doi.org/10.15642/islamica.2022.16.1.1-24>.

kelembagaan yang profesional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi sumber pembiayaan, serta inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Penguatan tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Kemandirian finansial dapat diwujudkan melalui pengembangan unit-unit usaha produktif, optimalisasi wakaf produktif, kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang selaras dengan karakteristik pesantren. Selain itu, integrasi kurikulum keislaman dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan abad ke-21 menjadi strategi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tanpa kehilangan identitas keislamannya. Beberapa strategi penguatan kemandirian lembaga pondok pesantren adalah:

1. Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Pengembangan Unit Usaha Produktif

Penguatan kemandirian ekonomi merupakan fondasi yang paling mendesak untuk dibangun agar pesantren dapat melepaskan diri dari ketergantungan finansial eksternal. Secara konseptual, pengembangan ekonomi pesantren harus berangkat dari nilai-nilai Islam tentang kerja keras, kejujuran, dan keadilan ekonomi, yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk unit-unit usaha produktif yang terintegrasi dalam ekosistem pesantren. Model ekonomi pesantren yang ideal adalah model yang mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan tujuan pendidikan, sehingga setiap unit usaha yang dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan bagi para santri²².

Beberapa model pengembangan ekonomi pesantren yang telah terbukti berhasil dan dapat dijadikan referensi antara lain: pertama, pengembangan

²² A. Mubarak, "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kewirausahaan Santri: Studi Multi-Kasus Di Pesantren Jawa.," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 167–189, <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.2.6892>.

koperasi pesantren (kopontren) yang mengintegrasikan layanan simpan pinjam, perdagangan, dan jasa dalam satu kelembagaan yang dikelola secara profesional; kedua, pengembangan usaha pertanian dan agribisnis berbasis lahan wakaf yang dimiliki pesantren; ketiga, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang melayani kebutuhan finansial komunitas pesantren dan masyarakat sekitar; serta keempat, pengembangan usaha berbasis teknologi digital seperti e-commerce produk pesantren dan layanan pendidikan online²³.

Strategi pengembangan ekonomi pesantren yang sistematis harus didukung oleh tiga prasyarat utama. Pertama, adanya komitmen kuat dari kiai dan pimpinan pesantren untuk menjadikan kemandirian ekonomi sebagai prioritas strategis jangka panjang. Kedua, adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen bisnis dan keuangan, yang dapat dibentuk melalui program pelatihan kewirausahaan bagi ustadz dan santri senior. Ketiga, adanya dukungan jaringan alumni yang solid dan terorganisasi, yang dapat berperan sebagai investor, mitra bisnis, atau pemberi dukungan teknis bagi pengembangan unit usaha pesantren.

2. Revitalisasi Nilai Kemandirian dalam Kurikulum dan Budaya Pesantren

Selain penguatan ekonomi, revitalisasi nilai-nilai kemandirian dalam kurikulum dan budaya pesantren merupakan strategi yang tidak kalah pentingnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemandirian institusional pada akhirnya bertumpu pada kemandirian individual para santri dan pengelola pesantren, yang dibentuk melalui proses pendidikan dan pembiasaan yang konsisten dan berkesinambungan. Kurikulum pesantren yang berorientasi kemandirian harus mampu memadukan kecakapan keilmuan Islam yang mendalam dengan kemampuan praktis dalam mengelola kehidupan secara mandiri dan produktif.

Implementasi nilai kemandirian dalam kurikulum pesantren dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan pertama adalah integrasi pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum formal

²³ M. Z. Roziqin, "Digitalisasi Usaha Pesantren: Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Teknologi Di Era 4.0.," *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 45–62., <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i1.47821>.

pesantren, di mana santri tidak hanya belajar fiqh muamalah secara teoritis, tetapi juga diberikan pengalaman praktis dalam mengelola usaha kecil di lingkungan pesantren. Pendekatan kedua adalah pengembangan program life skills yang komprehensif, mencakup keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan keterampilan manajerial yang relevan dengan kebutuhan santri setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren ²⁴.

Revitalisasi budaya pesantren yang menopang kemandirian juga harus mencakup pembaruan dalam sistem pengelolaan santri. Sistem kepramukaan dan keorganisasian santri yang telah lama menjadi bagian dari tradisi pesantren perlu direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan organisasi di era kontemporer. Model pembelajaran demokratis berbasis musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif yang selama ini dipraktikkan dalam forum-forum santri perlu diperkuat dan dilembagakan sebagai bagian dari sistem pendidikan pesantren yang secara eksplisit bertujuan membentuk santri yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.

3. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas

Strategi ketiga yang tidak kalah strategis adalah penguatan tata kelola kelembagaan pesantren. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tata kelola yang lemah merupakan salah satu faktor utama yang memperlemah kemandirian pesantren dan membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk intervensi dan ketergantungan eksternal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang berbasis prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum merupakan keniscayaan bagi pesantren yang ingin mempertahankan dan memperkuat kemandiriannya di era kontemporer.

Penguatan tata kelola pesantren dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pembentukan Badan Hukum Pesantren yang memberikan kepastian legal bagi pesantren dalam mengelola aset, menjalankan

²⁴ D. Zamakhsyari, "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Life Skills Di Pondok Pesantren: Integrasi Antara Kecakapan Akademik Dan Keterampilan Hidup,," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 101–120, <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.11023>.

usaha, dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Kedua, pengembangan sistem manajemen keuangan yang profesional dan akuntabel, termasuk penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik pesantren sebagai lembaga nirlaba berbasis wakaf dan filantropi Islam. Ketiga, pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang memungkinkan pesantren untuk secara mandiri mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya tanpa sepenuhnya bergantung pada penilaian dari lembaga akreditasi eksternal²⁵.

Aspek penting lainnya dalam penguatan tata kelola adalah pengembangan sistem regenerasi kepemimpinan yang terencana dan sistematis. Pesantren perlu mengembangkan mekanisme kaderisasi kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada jalur genetis (keturunan kiai), tetapi juga terbuka bagi figur-figur kompeten dari luar keluarga kiai yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan komitmen yang kuat terhadap visi dan misi pesantren. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pesantren sebagai lembaga yang mandiri dan dinamis meskipun terjadi perubahan dalam kepemimpinan puncaknya²⁶

Terakhir, penguatan jaringan antar-pesantren merupakan strategi struktural yang sangat penting dalam memperkuat kemandirian kolektif pesantren. Melalui jaringan yang kuat, pesantren dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman terbaik dalam mengelola kemandirian, serta secara kolektif memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemandirian dan identitas pesantren. Model federasi pesantren atau asosiasi pesantren yang telah berkembang di beberapa daerah dapat menjadi referensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada skala yang lebih luas.

Dengan menerapkan strategi tersebut secara berkelanjutan, pondok pesantren akan memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih mandiri, tangguh,

²⁵ M. Huda, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren: Model Dan Implementasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 19, no. 1 (2022): 88–107., <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.191-05>.

²⁶ E Nurhayati and I. Subqi, "Kaderisasi Kepemimpinan Pesantren Berbasis Kompetensi: Menuju Regenerasi Yang Berkesinambungan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2023): 44–63., <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201-03>.

dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam serta pembangunan masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kemandirian lembaga pendidikan pondok pesantren bukan sekadar warisan historis yang perlu dilestarikan, melainkan merupakan imperatif strategis yang menentukan keberlanjutan dan relevansi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang autentik di era kontemporer. Kemandirian pesantren yang dikonseptualisasikan dalam tiga dimensi teologis-kultural, tata kelola kelembagaan, dan ekonomi dalam menghadapi berbagai tekanan yang semakin kompleks, baik yang bersumber dari dalam kelembagaan pesantren itu sendiri maupun dari dinamika lingkungan eksternal berupa homogenisasi regulasi pendidikan nasional dan arus ideologi global. Urgensi penguatan kemandirian pesantren dengan demikian bersifat menyeluruh dan tidak dapat ditunda.

Strategi penguatan kemandirian pesantren yang ditawarkan dalam kajian ini meliputi tiga pilar yang saling melengkapi: pengembangan ekonomi pesantren berbasis unit usaha produktif dan kewirausahaan santri, revitalisasi nilai-nilai kemandirian dalam kurikulum dan budaya kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan sistem regenerasi kepemimpinan yang terencana. Implementasi ketiga strategi ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pesantren, dukungan kebijakan pemerintah yang benar-benar menghormati otonomi pesantren, serta penguatan jaringan kolaboratif antar-pesantren sebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.

Daftar Rujukan

- Anwar, S, and M. Ardiansyah. "Transformasi Kepemimpinan Pondok Pesantren Dari Karismatik Menuju Manajerial: Studi Kasus Pesantren Tradisional Di Jawa Timur." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 112–130. <https://doi.org/10.21111/educan.v9i2.6541>.
- Bashori, B. "Standardisasi Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 45–68. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.11873>.
- Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Edisi Revisi)*. LP3ES., 2020.

- Fajri, M. N, and A. Rohmanu. "Otonomi Kelembagaan Pesantren Dan Respons Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional." *Jurnal Tarbiyatuna* 12, no. 1 (2021): 75–94. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v12i1.4782>.
- Fakhrurridha, Hujjatul et al. "Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta Melalui Tafsir Al-Qur'an Untuk Penguatan Empati Dan Regulasi Emosi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1426–38.
- Fikri, M, and M. Ghozali. "Transformasi Digital Pesantren: Peluang Dan Tantangan Dalam Mempertahankan Identitas Keilmuan Islam." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2021): 131–149. <https://doi.org/10.35891/amb.v6i2.2346>.
- Harisudin, M. N. "Relasi Kuasa Pesantren Dan Negara Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2022): 205–228. <https://doi.org/10.15642/islamica.2022.16.2.205-228>.
- Huda, M. "Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren: Model Dan Implementasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 19, no. 1 (2022): 88–107. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.191-05>.
- Huda, M et al. "Nilai-Nilai Kemandirian Dalam Tradisi Pesantren: Kajian Historis Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.12231>.
- Ismail, Ismail, and Moh Wardi Moh Wardi. "Transforming Elementary School Students' Science Literacy through Scratch-Based E-Modules Integrated with Islamic Value." *International Journal of Elementary Education* 9, no. 2 (2025): 237–47.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS., 2019.
- Mubarak, A. "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kewirausahaan Santri: Studi Multi-Kasus Di Pesantren Jawa." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 167–189. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.2.6892>.
- Muhtifah, L, and A. Suryadi. "Kemandirian Ekonomi Sebagai Prasyarat Otonomi Pesantren: Analisis Kritis Terhadap Model Pembiayaan Pesantren Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2022): 55–78. <https://doi.org/10.21111/educan.v10i1.7214>.
- Mujib, A, and J. Mudzakkir. "Pengembangan Unit Usaha Produktif Pesantren Dalam Kerangka Kemandirian Ekonomi: Studi Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 34–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.5531>.
- Najmi, Akmalun et al. "Intrinsic Motivation in Islamic Education: A Comparative Study of Abraham Maslow's Theory and the Concept of Ghirah in Islamic Psychology." *ILJ: Islamic Learning Journal* 4, no. 2 (2026): 273–308.
- . "Peningkatan Kecerdasan Spritual Melalui Konsep 'Ikhlâs Dan Ridhâ' Atas Pengabdian Kepada Keluarga Guru (Kyai) Pondok Pesantren." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 264–76.

- Noor, M. "Pesantren Dan Modal Sosial: Analisis Bourdieuan Terhadap Kemandirian Institusional Pesantren Di Indonesia." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 16, no. 1 (2020): 78–101. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v16i1.9285>.
- Nurhayati, E, and I. Subqi. "Kaderisasi Kepemimpinan Pesantren Berbasis Kompetensi: Menuju Regenerasi Yang Berkesinambungan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2023): 44–63. <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201-03>.
- Roziqin, M. Z. "Digitalisasi Usaha Pesantren: Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Teknologi Di Era 4.0." *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 45–62. <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i1.47821>.
- Saputra, Gondo Adhi et al. "Epistemologi Pendidikan Agama Islam: Integrasi Sumber Transenden Dan Rasional Dalam Pembentukan Kesadaran Religius Peserta Didik." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 186–96.
- Wahab, A. J. "Pesantren Dan Tantangan Ideologi Trans-Nasional: Mempertahankan Identitas Keislaman Moderat Di Era Globalisasi." *Jurnal Islamica* 16, no. 1–24 (2022). <https://doi.org/10.15642/islamica.2022.16.1.1-24>.
- Wahid, A, and M. Amin. "Implikasi Undang-Undang Pesantren Terhadap Otonomi Dan Kemandirian Kelembagaan Pondok Pesantren." *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2021): 198–218. <https://doi.org/10.21154/jsim.v14i2.3091>.
- Wardi, Moh et al. "Digital Transformation of Islamic Boarding School Financial System; Formulation, Implementation and Evaluation." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2024): 461–82.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Edisi Revisi)*. Ciputat Press., 2020.
- Zamakhsyari, D. "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Life Skills Di Pondok Pesantren: Integrasi Antara Kecakapan Akademik Dan Keterampilan Hidup." *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 101–120. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.11023>.
- Zarkasyi, A. S. "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Dakwah." In *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*, edited by S.A Wahid, 89–110. Pustaka Hidayah., 2020.